
Analisis *Framing* Pemberitaan Komite Pembangunan Papua pada Portal Berita Tempo

Alan Firmansyah

Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Indonesia

Email Korespondens: alanfirmansyah@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the framing used by Tempo in reporting the establishment of the Executive Committee for Accelerating Special Autonomy Development in Papua by President Prabowo Subianto. The analysis employs Robert N. Entman's framing model consisting of four components: define problems, diagnose causes, make moral judgment, and treatment recommendation. Using a descriptive qualitative approach, the unit of analysis is a Tempo article titled "Komite Pembangunan Papua untuk Siapa?" (October 13, 2025). The findings reveal that Tempo frames the committee's establishment as a repetition of outdated and ineffective development approaches that fail to address the political, historical, and humanitarian roots of the Papua conflict. Tempo highlights structural discrimination, human rights violations, and the top-down paradigm of governance as major issues. The article concludes that the central government must shift from a security-development framework toward recognition, dialogue, and meaningful participation of Papuans.

Keywords: *Framing, Robert N. Entman, Tempo, Papua Development Committee.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan Tempo mengenai pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua oleh Presiden Prabowo Subianto. Analisis menggunakan model framing Robert N. Entman melalui empat komponen: define problems, diagnose causes, moral judgment, dan treatment recommendation. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan unit analisis berupa teks berita Tempo berjudul "Komite Pembangunan Papua untuk Siapa?" (13 Oktober 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo membingkai kebijakan pembentukan Komite sebagai pengulangan pendekatan pembangunan yang keliru, top-down, dan gagal menjawab akar konflik Papua. Tempo menonjolkan narasi sejarah diskriminasi, kegagalan pembangunan, maraknya pelanggaran HAM, serta ketidakefektifan kebijakan Otsus sebagai argumentasi bahwa Komite tersebut tidak relevan dan justru mempertebal jarak antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Rekomendasi yang dibangun Tempo adalah perlunya perubahan paradigma negara: dari pendekatan keamanan dan pembangunan teknokratis menuju pengakuan martabat, hak politik, dan partisipasi orang Papua.

Kata Kunci: *Framing, Robert N. Entman, Tempo, Komite Percepatan Pembangunan Papua.*

PENDAHULUAN

Isu Papua merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam sejarah politik Indonesia, bukan hanya karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, tetapi juga karena melibatkan berlapis-lapis dimensi sosial, politik, ekonomi, historis, dan identitas. Konflik di Papua tidak dapat dipahami semata sebagai ketertinggalan pembangunan, melainkan sebagai akumulasi panjang dari pengalaman ketidakadilan struktural, praktik militerisasi, marginalisasi politik, serta trauma kolektif yang diwariskan sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Selama beberapa dekade, konflik ini terus memproduksi ketimpangan sosial-ekonomi yang ekstrem, peristiwa kekerasan yang berulang, stigmatisasi terhadap orang Papua, serta krisis kepercayaan yang mendalam antara negara dan masyarakat lokal. Seperti ditunjukkan oleh Lestari (2023), persoalan di Papua mengakar dalam kegagalan negara menghadirkan rasa aman, rasa keadilan, serta pengakuan terhadap identitas dan martabat orang Papua. Muridan (2020) juga menjelaskan bahwa banyak kebijakan pemerintah terhadap Papua bersifat sentralistik dan top-down sehingga gagal menangkap keragaman konteks sosial, adat, dan sejarah yang khas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, akar persoalan Papua melampaui isu infrastruktur dan ekonomi semata, tetapi terutama terkait dengan relasi kekuasaan yang timpang dan absennya ruang politik yang setara bagi orang Papua untuk menentukan masa depan mereka.

Dalam dinamika yang kompleks tersebut, media massa memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai peristiwa di Papua, tetapi juga berperan sebagai aktor diskursif yang memilih bagaimana suatu peristiwa ditampilkan, narasi apa yang disorot, dan suara siapa yang diberi ruang. Media pada praktiknya memiliki kemampuan untuk memproduksi realitas sosial melalui mekanisme seleksi dan penonjolan aspek tertentu, sehingga dapat memperkuat atau melemahkan klaim politik pihak tertentu. Sejalan dengan analisis Entman (2007), framing adalah proses yang memberikan penekanan pada sebagian aspek realitas sehingga mendorong interpretasi, evaluasi moral, serta rekomendasi solusi tertentu bagi publik. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang dianggap sebagai masalah, siapa yang dipandang sebagai penyebab, dan bagaimana masalah tersebut seharusnya diselesaikan. Dalam konteks Papua, framing media berperan membangun persepsi publik mengenai legitimasi tindakan negara, urgensi pembangunan, atau sebaliknya membuka ruang kritik terhadap praktik kekerasan dan ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua.

Persoalan Papua juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum yang melandasi arah kebijakan negara. Politik hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang menentukan nilai, orientasi, dan tujuan pembentukan kebijakan publik, termasuk dalam konteks pembangunan daerah khusus. Septiani dan Fikriana (2023) menegaskan bahwa politik hukum merupakan pedoman fundamental dalam merumuskan, merancang, dan mengembangkan regulasi nasional agar selaras dengan tujuan negara. Namun, dalam praktiknya, kebijakan

Papua kerap menunjukkan ketimpangan antara norma dan implementasi, di mana desain hukum dan kelembagaan lebih mencerminkan kepentingan pusat dibanding kebutuhan masyarakat lokal. Kondisi ini berkontribusi pada berulangnya kebijakan pembangunan yang bersifat teknokratis dan sentralistik, tanpa penyelesaian substantif terhadap persoalan historis, politik, dan kultural Papua. Dengan demikian, analisis framing media menjadi penting untuk melihat bagaimana kebijakan yang berakar pada politik hukum tersebut direpresentasikan dan dikritisi dalam ruang publik.

Tempo sebagai salah satu media nasional dengan tradisi jurnalisme investigatif dan kritis memiliki posisi strategis dalam wacana mengenai Papua. Tempo tidak sekadar melaporkan peristiwa, tetapi kerap menyajikan analisis mendalam dan perspektif evaluatif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika Presiden Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada Oktober 2025, Tempo merespons dengan tulisan kritis berjudul "Komite Pembangunan Papua untuk Siapa?" yang mempertanyakan orientasi, struktur, dan kepentingan politik di balik pembentukan lembaga tersebut. Artikel tersebut bukan hanya memeriksa efektivitas kebijakan, tetapi juga menyoroti kecenderungan pemerintah mereproduksi paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down, yaitu pendekatan yang menekankan modernisasi dan proyek fisik tanpa mengatasi akar persoalan terkait hak politik, representasi, dan pengakuan budaya. Tempo dengan jelas menggarisbawahi bahwa penerusan pendekatan teknokratis justru dapat mengulang kegagalan kebijakan sebelumnya, terutama jika pelibatan masyarakat Papua kembali dikesampingkan.

Melihat konteks tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial sekaligus. Pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan langkah kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga politis karena berkaitan langsung dengan bagaimana negara merancang strategi penyelesaian konflik Papua. Dengan menganalisis framing Tempo terhadap kebijakan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana media mengonstruksi makna, menyusun kritik, dan membentuk wacana publik mengenai arah kebijakan negara. Penelitian framing seperti ini penting untuk memahami relasi antara media, kekuasaan, dan opini publik, terutama dalam isu sensitif seperti Papua di mana representasi media dapat mempengaruhi legitimasi kebijakan, kualitas demokrasi, dan persepsi publik terhadap keadilan. Analisis ini juga relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana media dapat menjadi ruang koreksi terhadap dominasi narasi negara atau justru memperkuatnya, serta bagaimana framing tertentu berkontribusi pada pembentukan pemahaman publik mengenai kompleksitas persoalan Papua.

METODE

Metode penelitian merupakan unsur fundamental dalam sebuah kajian ilmiah karena melalui metode yang tepat peneliti dapat memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami fenomena secara

menyeluruh melalui deskripsi berbasis kata, bahasa, dan konteks, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2015). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap konstruksi realitas media mengenai Papua dalam konteks kebijakan awal pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama ketika negara memperkenalkan instrumen baru berupa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Dengan pendekatan ini, pemberitaan Tempo dapat dianalisis sebagai teks yang memuat nilai, penekanan, serta kecenderungan ideologis tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan dan menjelaskan pola pembingkaian yang digunakan Tempo dalam menyusun makna mengenai kebijakan pembentukan Komite tersebut. Sifat deskriptif ini memungkinkan peneliti menganalisis karakter, struktur, dan pesan yang muncul dalam pemberitaan, sejalan dengan pandangan Bungin (2008) bahwa penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengungkap watak, makna, serta relasi simbolik dalam teks. Dalam konteks penelitian ini, yang dianalisis adalah cara Tempo menyoroti penanganan konflik Papua melalui pemilihan kata, struktur argumentasi, sudut pandang, serta cara media menempatkan isu pembangunan dan konflik dalam kerangka tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita Tempo berjudul "Komite Pembangunan Papua untuk Siapa" yang dipublikasikan pada 13 Oktober 2025. Teks berita tersebut diperlakukan sebagai konstruksi realitas yang telah melalui proses seleksi redaksional, sehingga representasi peristiwa di dalamnya tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh preferensi editorial dan perspektif jurnalisme Tempo. Data primer penelitian berupa dokumen berita tersebut, sementara data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan framing media, studi Papua, politik pembangunan, jurnalisme kritis, serta analisis wacana media. Kerangka analisis utama penelitian ini adalah model framing Robert N. Entman yang digunakan secara luas dalam kajian komunikasi politik. Entman melihat framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas sehingga bagian tertentu terlihat lebih penting dibanding bagian yang lain. Elemen framing menurut Entman mencakup empat komponen utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, define problems, yaitu mengidentifikasi bagaimana Tempo mendefinisikan persoalan yang berkaitan dengan pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Papua. Kedua, diagnose causes, yaitu menelusuri siapa atau apa yang dianggap media sebagai penyebab utama masalah atau ketidakefektifan kebijakan Papua sebelumnya. Ketiga, make moral judgment, yaitu membaca nilai moral, kritik, atau penilaian etis yang tersirat dalam narasi berita. Keempat, treatment recommendation, yaitu melihat solusi atau tindakan yang dianggap perlu menurut wacana yang dibangun Tempo (Eriyanto, 2011).

Proses analisis dilakukan melalui pembacaan tekstual dan interpretatif secara mendalam terhadap isi berita. Setiap paragraf dianalisis untuk menemukan struktur makna, kecenderungan naratif, dan cara argumentasi dibangun. Kutipan narasumber, pilihan kosakata, serta urutan penyajian fakta juga ditelaah untuk mengidentifikasi orientasi redaksional Tempo dalam mengonstruksi makna konflik Papua. Dalam tahap ini, peneliti juga membandingkan teks dengan literatur

akademik mengenai Papua agar dapat melihat sejauh mana pemberitaan Tempo selaras atau berbeda dengan studi akademik yang sudah mapan. Pendekatan framing memungkinkan peneliti tidak hanya melihat apa yang diberitakan Tempo, tetapi juga bagaimana realitas tersebut dipilih, disusun, dan diarahkan untuk menghasilkan makna tertentu. Melalui kerangka analisis ini, penelitian ini dapat membaca relasi antara konstruksi wacana Tempo, orientasi kritik media terhadap kebijakan awal pemerintahan Prabowo-Gibran, serta bagaimana pemberitaan tersebut membentuk persepsi publik mengenai arah kebijakan pembangunan dan penanganan konflik Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap pemberitaan Tempo mengenai Komite Percepatan Pembangunan Papua menunjukkan pola pembingkaian yang menempatkan isu Papua terutama sebagai persoalan pembangunan yang dapat diselesaikan melalui intervensi administratif dan penguatan birokrasi pusat. Tempo lebih sering memaknai Papua melalui lensa pembangunan yang membutuhkan percepatan, penataan, dan koordinasi intensif, sehingga problem Papua dipahami secara dominan sebagai ketertinggalan dalam manajemen pemerintahan dan layanan publik. Pembacaan semacam ini sejalan dengan kecenderungan media arus utama di era komunikasi digital yang, menurut López-Rabadán (2021), cenderung mereduksi persoalan politik yang kompleks menjadi rangkaian persoalan teknis yang tampak dapat ditangani melalui kebijakan negara yang dirancang secara teknokratis. Dengan demikian, Tempo turut mereproduksi pola penyederhanaan isu yang lazim ditemukan dalam studi framing kontemporer yang menunjukkan bahwa narasi pembangunan sering memperoleh posisi hegemonik dalam pemberitaan yang bersinggungan dengan kebijakan negara (Van Gorp, 2021).

Kecenderungan untuk mengutamakan sumber resmi tampak sangat kuat. Dalam hampir seluruh pemberitaan, pejabat pusat, menteri, dan figur militer-politik menjadi aktor utama yang mendefinisikan masalah dan menentukan arah solusi. Perspektif masyarakat adat atau tokoh lokal Papua hanya muncul sebagai suara reaktif dan tidak memiliki fungsi penentu dalam pembingkaian masalah. Hal ini selaras dengan temuan Chauvel (2021) yang menegaskan bahwa wacana Papua di tingkat nasional masih dikuasai oleh narasi negara yang menempatkan keamanan dan pembangunan sebagai fondasi analitis, sehingga suara masyarakat Papua sering kali tersubordinasi dalam ruang publik. Wangge dan Lawson (2023) juga menunjukkan bahwa hubungan Papua dengan Jakarta didominasi oleh logika pengelolaan administratif dan keamanan, bukan relasi politik yang setara. Dengan demikian, pemberitaan Tempo secara tidak langsung memperkuat kesenjangan representasi antara narasi negara dan narasi masyarakat Papua.



Gambar 1. Berita komite pembangunan Papua pada portal Tempo

Dari perspektif historis dan kebijakan, pola pembingkaian Tempo yang menekankan percepatan pembangunan patut dipahami dalam konteks lebih luas mengenai implementasi otonomi khusus Papua selama lebih dari dua dekade. Penelitian Sopaheluwanan, Rumadan, dan rekan-rekan (2023) menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak dapat dipisahkan dari persoalan struktural mengenai pengakuan hak ulayat, pengelolaan sumber daya, dan relasi kuasa antara Jakarta dan komunitas adat. Oleh karena itu, ketika Tempo menempatkan pembangunan sebagai solusi yang dapat memperbaiki kondisi Papua, pemberitaan tersebut cenderung mengalihkan perhatian dari ketidaksetaraan struktural menuju optimisme teknokratis. Baird (2024) menyebut fenomena ini sebagai depolitisasi isu, yaitu ketika kebijakan yang tampak progresif justru menyingkirkan perdebatan mendasar mengenai keadilan, representasi, dan hak politik masyarakat adat.

Analisis wacana terhadap pilihan bahasa dan leksikon pemberitaan menunjukkan pola legitimasi tindakan pemerintah. Istilah seperti "percepatan", "koordinasi cepat", dan "kerja langsung" mengonstruksi citra negara sebagai aktor yang sigap, stabil, dan mampu mengelola persoalan Papua secara sistematis. Menurut Martha, Supadiyanto, dan kolega (2022), pemilihan leksikon semacam ini berfungsi sebagai modalitas yang memperkuat persepsi publik mengenai efektivitas dan kehadiran negara. Koivula, Porttikivi, dan rekan-rekan (2024) menambahkan bahwa modalitas bahasa yang menekankan kecepatan dan ketegasan memiliki efek framing yang kuat dalam membentuk persepsi publik tentang kredibilitas otoritas. Dengan demikian, pemberitaan Tempo secara tidak langsung memosisikan negara sebagai pusat solusi dan mempersempit ruang bagi wacana alternatif mengenai keadilan struktural atau rekonsiliasi budaya.

Implikasi dari pola pembingkaian tersebut sangat luas. Orientasi teknokratis mengaburkan kebutuhan untuk menghadirkan perubahan politik yang lebih fundamental, khususnya terkait pelibatan komunitas adat sebagai aktor utama dalam perencanaan pembangunan. Soetjipto (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebijakan pembangunan dan aspirasi politik masyarakat adat merupakan salah satu sumber ketegangan yang terus berulang di Papua. Ketika Tempo mengedepankan narasi pembangunan tanpa mengevaluasi secara kritis implementasinya, publik tidak memperoleh ruang referensial yang cukup untuk

menilai apakah kebijakan percepatan benar-benar menghasilkan perubahan substantif. Di sisi lain, absennya data evaluatif dan sumber independen dalam pemberitaan membuat klaim keberhasilan pemerintah tidak dapat divalidasi, suatu kondisi yang menurut Zain (2023) berdampak pada melemahnya akuntabilitas kebijakan Papua.

Analisis multimodal terhadap visual pemberitaan memperlihatkan bahwa Tempo lebih banyak menggunakan citra pembangunan seperti foto infrastruktur, rapat pejabat, dan kunjungan kerja. Visualisasi seperti ini memperkuat narasi pembangunan, karena gambar memiliki kekuatan emosional yang lebih tinggi dibanding teks. Geise dan Xu (2024) menunjukkan bahwa elemen visual berpengaruh kuat dalam menormalisasi interpretasi moral publik, terutama ketika representasi kehidupan sosial masyarakat lokal tidak dihadirkan. Ketika visual pembangunan lebih dominan, publik cenderung menerima asumsi bahwa pembangunan adalah jawaban utama bagi persoalan Papua, meskipun penelitian mengenai konflik menunjukkan perlunya pendekatan berbasis keadilan, rekonsiliasi, dan dialog sosial budaya.

Secara metodologis, penggunaan kerangka framing Entman yang terdiri dari pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi – memberi pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Tempo mengonstruksi isu Papua. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penggunaan sumber resmi yang dominan, pemilihan leksikon yang menormalkan tindakan negara, dan visualisasi pembangunan secara bersama-sama membentuk makna publik mengenai Papua. Temuan ini memperkuat argumen López-Rabadán (2021) bahwa framing media bekerja melalui interaksi antara struktur wacana, sumber informasi, dan representasi visual, sehingga media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk horizon pemaknaan publik mengenai isu politik yang kompleks.

SIMPULAN

Pemberitaan Tempo tentang Komite Percepatan Pembangunan Papua menunjukkan pola framing yang cenderung menempatkan problem sebagai isu pembangunan yang dapat diatasi oleh instrumen kenegaraan dan birokrasi pusat. Pembingkaiian ini, dengan dominasi sumber resmi dan visual yang menonjolkan simbol pembangunan, berpeluang mengalihkan perhatian dari tuntutan struktural seperti pengakuan hak adat, distribusi sumberdaya, dan akuntabilitas HAM yang menurut kajian lain masih menjadi titik krisis dalam penyelesaian konflik Papua. Secara praktis, framing semacam ini dapat mengurangi ruang bagi wacana alternatif dan evaluasi independen, sehingga kebijakan yang dihasilkan berisiko bersifat top-down dan kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat Papua. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari kajian ini adalah: (1) media perlu memperkaya pluralitas sumber (memasukkan suara komunitas adat dan peneliti independen), (2) menampilkan data evaluatif dan indikator keberhasilan yang konkret, serta (3) mengimbangi narasi pembangunan dengan perhatian struktural terhadap pengakuan hak dan keadilan sosial langkah yang akan membantu menjaga akuntabilitas publik dan meningkatkan kualitas demokrasi deliberatif dalam

penanganan isu Papua. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang framing di era media digital yang menekankan pentingnya memperhatikan dimensi pesan, aktor, dan modalitas visual agar publik memiliki pemahaman yang lebih lengkap dan kritis.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu, R. (2024). Special Autonomy Policy of Papua Province. Edunity. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i1.219>
- Ariyadi, Y. (2024). Transfer ke daerah: Dana Otonomi Khusus Papua, perspektif... Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 5(2). <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.514>
- Baird, N. (2024). The Universal Periodic Review and West Papua: Beyond invisibility? International Journal on Minority and Group Rights, 32(1). <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10158>
- Chauvel, R. (2021). West Papua: Indonesia's last regional conflict. Small Wars & Insurgencies, 32(6), 913–944. <https://doi.org/10.1080/09592318.2021.1990491>
- Entman, R. M. (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. Journal of Communication, 57(1), 163–173.
- Eriyanto. (2011). Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media. Kencana.
- Geise, S., & Xu, Y. (2024). Effects of visual framing in multimodal media environments: A systematic review of studies between 1979 and 2023. Journalism & Mass Communication Quarterly. <https://doi.org/10.1177/10776990241257586>
- Koivula, A., Marttila, E., & Koiranen, I. (2024). Media framing and trust: A randomized survey experiment on attitudes towards the unvaccinated during the COVID-19 pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 10(2), 101157. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101157>
- López-Rabadán, P. (2021). Framing studies evolution in the social media era: Digital advancement and reorientation of the research agenda. Social Sciences, 11(1), 9. <https://doi.org/10.3390/socsci11010009>
- Martha, J., Harsawaskita, A., Syawfi, I., & Margono, V. T. (2022). Analisis framing: Pemberitaan media massa mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 7(02), 247–273. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1070>
- Permadi, D. (2024). Analysis of media framing on Indonesian Constitutional Court's decision... Legal Journal, 12(6). <https://doi.org/10.35335/legal.v12i6.891>
- Septiani, D., & Fikriana, A. (2023). Peran politik hukum dalam pembaharuan hukum tata negara untuk melaksanakan tujuan negara Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.75>
- Siregar, I. A. (2025). Analisis framing pemberitaan media online: Studi perbandingan. (Contoh penerapan model Entman pada berita Tempo). (DOI sesuai jurnal lokal).

- Soetjipto, A. W. (2022). Journey to justice: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the context of West Papua. *Journal of ASEAN Studies*, 10(1), 129–149. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.8491>
- Sopaheluwakan, W. R. I., Fatem, S. M., Kutanegara, P. M., & Maryudi, A. (2023). Two-decade decentralization and recognition of customary forest rights: Cases from Special Autonomy policy in West Papua, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 151, 102951. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102951>
- Van Gorp, B. (2021). Deproblematization as an enrichment of framing theory. *Journal of Political Marketing*. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2021.1988615>
- Wangge, H. R., & Lawson, S. (2023). The West Papua issue in Pacific regional politics: Explaining Indonesia's foreign policy failure. *The Pacific Review*, 36(1), 61–89. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1931417>
- Zain, E. M. (2023). The implementation of Special Autonomy in Southwest Papua: Empirical study. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v9i2.2961>